



Implementasi Program PKK dalam Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan Perempuan di Desa Naga Timbul

Implementation of the PKK Program in Improving Women's Education and Skills in Naga Timbul Village

Ayu Utami, Beby Masitho Batubara* & Nina Angelia

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan di Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa. Implementasi merupakan tahap penting dalam proses kebijakan karena menyangkut realisasi program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengacu pada teori Edward III, yang mencakup empat indikator keberhasilan kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PKK belum berjalan optimal. Komunikasi dinilai cukup baik, sumber daya dan disposisi tergolong memadai, namun struktur birokrasi belum terorganisir dengan baik. Selain itu, masih banyak perempuan di desa yang belum menunjukkan peningkatan pendidikan dan keterampilan. Faktor penghambat utama berasal dari rendahnya kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan, serta kurang maksimalnya sosialisasi dari pengurus PKK. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran kader dan peningkatan keterlibatan masyarakat agar program PKK lebih efektif.

Kata kunci: Implementasi kebijakan; Program PKK; Pendidikan Keterampilan.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Family Empowerment and Welfare Program (PKK) in improving women's education and skills in Naga Timbul Village, Tanjung Morawa District. Implementation is an important stage in the policy process because it concerns the realization of the program to achieve the set goals. This study uses a descriptive qualitative approach and refers to Edward III's theory, which includes four indicators of policy success: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study show that the implementation of the PKK program has not been optimal. Communication is considered quite good, and resources and disposition are adequate, but the bureaucratic structure is not well organized. In addition, many women in the village still have not shown improvement in education and skills. The main inhibiting factors come from low awareness, understanding, and community participation in participating in training, as well as the lack of maximum socialization from PKK management. Therefore, it is necessary to strengthen the role of cadres and increase community involvement to make the PKK program more effective.

Keywords: Policy Implementation; PKK Program; Skills Education.

How to Cite: Utami, A., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2025). Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan Perempuan di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(1): 1-8,

*E-mail: beby@staff.uma.ac.id

ISSN 2721-7507 (Online)



PENDAHULUAN

Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, terutama dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Dalam konteks pembangunan pedesaan, perempuan sering kali menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan keluarga, pendidikan anak, serta ekonomi rumah tangga (Barus et al., 2020; Munthe & Hafi, 2018). Oleh karena itu, upaya untuk memberdayakan perempuan menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hadir sebagai inisiatif pemerintah yang berperan aktif dalam mengembangkan potensi keluarga, khususnya perempuan, dalam meningkatkan pendidikan, keterampilan, serta kesejahteraan ekonomi (Al'amin, 2017; Waziana et al., 2022). Program ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007 yang memberikan pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, termasuk PKK, agar dapat berfungsi optimal dalam mendukung pembangunan desa.

Desa Naga Timbul, yang terletak di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program PKK. Sebagaimana desa-desa lain di Indonesia, Desa Naga Timbul memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, khususnya perempuan. Melalui program PKK, perempuan didorong untuk lebih aktif dalam kegiatan pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, serta kegiatan ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga (Indrawati et al., 2022; Santifa & Harahap, 2020; Siregar et al., 2022). Hal ini sesuai dengan tujuan PKK, yaitu membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin menuju terwujudnya keluarga yang maju, mandiri, harmonis, dan sejahtera.

Namun, pelaksanaan program PKK di Desa Naga Timbul tidak serta-merta berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya dari kalangan ibu rumah tangga. Beberapa di antara mereka masih enggan untuk terlibat dalam kegiatan PKK karena kurangnya pemahaman, kesibukan domestik, atau minimnya dukungan dari lingkungan sekitar (Herlina, 2019; Sunaryo, 2020). Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam sumber daya manusia (SDM) pengelola program, baik dari segi kapasitas kader PKK maupun dukungan teknis dari pemerintah desa. Sosialisasi yang kurang intensif dan tidak merata juga menjadi faktor penghambat dalam menyebarluaskan informasi tentang manfaat serta pentingnya keterlibatan aktif dalam program ini (Indah, 2019; Lubis, 2021; Purba & others, 2024).

PKK seharusnya menjadi wadah strategis dalam menumbuhkan potensi dan peran perempuan, termasuk dalam meningkatkan pendidikan dan keterampilan sebagai bekal menghadapi tantangan ekonomi keluarga (Mirna & Mardhiah, 2022; Rahmi et al., 2023). Melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, perempuan didorong untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dan kritis dalam menentukan arah pembangunan desa (Kurniaty et al., 2021; Sembiring et al., 2021; Simangunsong, 2015) Oleh karena itu, implementasi program PKK perlu dikaji secara mendalam untuk melihat sejauh mana keberhasilannya dalam menjangkau dan memberdayakan perempuan di desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program tersebut.

Penelitian sebelumnya yang relevan memberikan gambaran awal mengenai dinamika implementasi program PKK di berbagai daerah. Misalnya, penelitian oleh Rusdi Nurazmi Izmi (2018) tentang implementasi program PKK di Nagori Siantar Estate, Kabupaten Simalungun, menunjukkan bahwa proses komunikasi antara kader dan masyarakat belum berjalan optimal, serta masih rendahnya kapasitas SDM dalam menjalankan program. Hal ini menjadi cerminan

bahwa keberhasilan program PKK sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, koordinasi, serta keterampilan pengelolanya. Sebaliknya, penelitian oleh Minarwati (2018) tentang peran PKK dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, menunjukkan bahwa program tersebut berjalan baik karena didukung oleh hubungan harmonis antara kader dan masyarakat serta pelaksanaan pelatihan keterampilan secara rutin.

Sementara itu, Harahap & Rizal (2019) dalam penelitiannya di Desa Simatahari, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menyoroti keberhasilan PKK dalam memberdayakan perempuan melalui kegiatan pelatihan, penyediaan peralatan keterampilan, serta pemasaran produk. Keberhasilan program ini juga terlihat dari kegiatan tambahan seperti posyandu balita dan lansia, serta pemberian makanan tambahan (PMT). Ketiga penelitian tersebut menegaskan bahwa implementasi PKK sangat dipengaruhi oleh peran aktif kader, kualitas pelatihan, serta dukungan sosial dari masyarakat. Namun, ketiganya juga menegaskan pentingnya evaluasi terhadap hambatan internal, seperti komunikasi yang belum efektif, keterbatasan fasilitas, serta partisipasi masyarakat yang fluktuatif.

Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konteks lokal sangat menentukan keberhasilan program PKK. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada implementasi program PKK di Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, sebagai studi kasus untuk menganalisis bagaimana program ini berjalan, sejauh mana capaian yang telah diraih, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali bagaimana perempuan di desa tersebut merespons program-program pemberdayaan yang ditawarkan, dan bagaimana peran mereka berkembang dalam mengelola kehidupan keluarga serta berkontribusi terhadap pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan di Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara utuh dengan memandang objek sebagai suatu sistem yang saling berkaitan (Arikunto, 2010). Dalam konteks ini, fenomena sosial terkait aktivitas PKK tidak hanya dilihat dari aspek formal pelaksanaannya, tetapi juga dari pengalaman subjektif para pelaku program, terutama perempuan peserta PKK. Penelitian ini juga merujuk pada definisi metode kualitatif oleh Bogdan dan Taylor (Moleong, 2016) sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan yang tergabung dalam kegiatan PKK, kader PKK desa, dan aparat desa yang memahami jalannya program PKK. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih partisipan berdasarkan kriteria tertentu, antara lain keterlibatan aktif dalam kegiatan PKK, pengalaman mengikuti pelatihan pendidikan atau keterampilan, serta peran dalam mendukung implementasi program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi non-partisipatif terhadap aktivitas PKK, dan dokumentasi berupa arsip kegiatan, notulen rapat, dan catatan administrasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman langsung dan pandangan para partisipan, sementara observasi dilakukan untuk mengamati interaksi sosial dan proses pelaksanaan program secara langsung. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memverifikasi temuan dari wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data

dari wawancara ditranskrip, dikodekan, dan dianalisis secara tematik untuk menemukan pola-pola yang berkaitan dengan pelaksanaan program PKK dan dampaknya terhadap pendidikan serta keterampilan perempuan desa. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member checking, yaitu mengonfirmasi hasil interpretasi data kepada informan untuk memastikan kesesuaian makna. Dengan demikian, metode ini memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih dalam terhadap dinamika pemberdayaan perempuan melalui PKK, serta menilai sejauh mana program ini mampu meningkatkan kapasitas individu dan kesejahteraan keluarga di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program PKK dalam Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan Perempuan di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa

Implementasi program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan bagian penting dalam proses kebijakan yang tidak hanya menyangkut tahap perumusan, tetapi juga tahap realisasi kebijakan itu sendiri. Implementasi menjadi jembatan antara kebijakan yang telah disusun dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, implementasi program PKK bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan sebagai bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia dan mendorong kesejahteraan keluarga. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Untuk menganalisis pelaksanaan program ini secara komprehensif, digunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang menitikberatkan pada empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dari sisi komunikasi, implementasi program PKK di Desa Naga Timbul sudah berjalan cukup baik. Informasi mengenai program yang disusun oleh pemerintah desa dapat disampaikan secara jelas kepada pelaksana dan juga kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan sebagai sasaran utama program. Hal ini menunjukkan bahwa pesan kebijakan telah diterima dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Para pengurus PKK telah mampu menjelaskan isi program dengan cukup jelas dan menggunakan pendekatan interpersonal yang bersahabat. Namun, yang menjadi catatan penting adalah kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Banyak perempuan di desa yang belum mengetahui secara menyeluruh tujuan dan manfaat program PKK karena terbatasnya kegiatan penyuluhan atau pertemuan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam kegiatan pemberdayaan ini belum merata, dan hanya beberapa kelompok yang aktif terlibat. Dengan kata lain, meskipun komunikasi berlangsung secara dua arah dan substansi program sudah tersampaikan, kurangnya jangkauan sosialisasi menyebabkan informasi tidak tersebar secara optimal.

Sumber daya menjadi elemen penting berikutnya dalam keberhasilan implementasi program. Di Desa Naga Timbul, sumber daya manusia dalam program PKK dinilai sudah cukup memadai. Para kader PKK dan pengurus telah memiliki komitmen dan kompetensi dasar dalam melaksanakan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat. Selain itu, sumber daya anggaran juga tidak mengalami hambatan berarti. Program-program seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan kesehatan, dan kegiatan pendidikan nonformal bagi perempuan telah dijalankan dengan dukungan dana dari pemerintah desa dan sumber lain yang sah. Kendati demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam pemanfaatan sumber daya manusia secara merata. Sebagian anggota masyarakat, khususnya perempuan yang seharusnya menjadi peserta aktif dalam program ini, masih enggan terlibat karena kurang percaya diri atau belum memahami

pentingnya peran mereka dalam pembangunan desa. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan motivasi, pendampingan, dan pemberian pelatihan yang lebih intensif agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan.

Selanjutnya, dalam indikator disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan, program PKK di Desa Naga Timbul menunjukkan hasil yang cukup baik. Para pelaksana, dalam hal ini kader dan pengurus PKK, menunjukkan sikap yang positif terhadap kebijakan pemberdayaan perempuan. Mereka tidak hanya menjalankan tugas karena kewajiban administratif, tetapi juga menunjukkan kemauan untuk memberdayakan masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi perempuan di desa. Ini terlihat dari upaya mereka menyelenggarakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat kue, serta keterampilan rumah tangga lainnya yang berguna bagi peningkatan pendapatan keluarga. Namun, sikap positif ini masih perlu didukung dengan pembinaan dan pengawasan yang lebih sistematis dari pihak desa atau instansi terkait, agar pelaksana tetap konsisten dan tidak kehilangan semangat dalam menjalankan program secara berkelanjutan.

Indikator terakhir adalah struktur birokrasi, yang sayangnya masih menjadi salah satu kelemahan utama dalam implementasi program PKK di Desa Naga Timbul. Struktur birokrasi yang seharusnya menjadi sistem pendukung dalam pelaksanaan program masih belum berjalan secara optimal. Para pengurus PKK cenderung menjalankan program berdasarkan musyawarah dan pengalaman, bukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang baku. Akibatnya, koordinasi antar pengurus tidak berjalan secara konsisten dan kinerja program menjadi tidak seragam. Ketidakteraturan ini membuat beberapa program tidak memiliki rencana kerja yang jelas, pelaporan yang terstruktur, atau evaluasi berkala yang seharusnya menjadi bagian penting dari manajemen program. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan ulang dalam sistem birokrasi PKK di desa ini dengan menekankan pentingnya SOP, pembagian tugas yang jelas, serta pelatihan administrasi dan manajerial bagi para kader.

Secara keseluruhan, implementasi program PKK di Desa Naga Timbul dalam upaya meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan telah menunjukkan kemajuan, terutama dari aspek komunikasi, disposisi pelaksana, dan kecukupan sumber daya. Namun, masih ada tantangan yang harus diselesaikan, khususnya dalam aspek struktur birokrasi dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Jika keempat indikator dalam teori Edward III dapat dioptimalkan secara seimbang, maka tujuan utama program PKK dalam menciptakan perempuan desa yang mandiri, terampil, dan berpendidikan akan lebih mudah tercapai. Perlu juga adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa, pengurus PKK, dan masyarakat, agar proses pemberdayaan tidak hanya menjadi program formalitas, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan dan potensi nyata yang ada di lingkungan masyarakat desa.

Faktor Penghambat Implementasi Program PKK dalam Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan Perempuan di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa

Pembahasan mengenai faktor penghambat dalam implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas program. Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan informan di lapangan mengungkapkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat berasal dari sisi internal pengurus PKK itu sendiri. Meskipun program ini telah dirancang untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan dan keterampilan, pelaksanaan sosialisasi program oleh pengurus dinilai masih kurang maksimal dan tidak konsisten. Hal ini ditunjukkan

dengan minimnya pemahaman para ibu rumah tangga yang menjadi target sasaran terhadap tujuan dan manfaat program. Kurangnya intensitas dan kontinuitas dalam penyampaian informasi menyebabkan program tidak mampu menjangkau seluruh kalangan masyarakat dengan baik.

Lebih lanjut, kemampuan kader dalam memberikan pengarahan juga menjadi sorotan penting. Dalam pelaksanaannya, para kader yang seharusnya menjadi ujung tombak penyampaian informasi dan motivator bagi masyarakat ternyata belum memiliki kapasitas yang cukup dalam membimbing dan memotivasi peserta program. Akibatnya, respon dan antusiasme masyarakat, khususnya kaum perempuan, menjadi rendah. Ketika masyarakat tidak memahami dengan jelas manfaat dan tujuan program, mereka cenderung mengabaikan atau bahkan enggan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang telah dirancang. Ketiadaan pelatihan yang intensif bagi kader dan kurangnya evaluasi berkala terhadap kinerja mereka semakin memperburuk situasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam struktur pengurus PKK sangat dibutuhkan guna memperkuat proses implementasi program di tingkat desa.

Di sisi lain, faktor eksternal dari masyarakat juga menjadi kendala dalam implementasi program PKK di Desa Naga Timbul. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, ditemukan bahwa peserta program belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal keterampilan maupun pengetahuan setelah mengikuti pelatihan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan komitmen dari ibu-ibu dalam mengikuti kegiatan. Cara berpikir yang masih pasif serta anggapan bahwa pelatihan tidak akan memberikan hasil nyata membuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan PKK menjadi minim. Selain itu, keterbatasan sarana transportasi menjadi masalah tersendiri, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari lokasi pelatihan. Kesulitan dalam menjangkau tempat kegiatan membuat sebagian besar ibu rumah tangga memilih untuk tidak hadir, sehingga kehadiran dan keterlibatan mereka dalam program menjadi sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas program juga harus menjadi perhatian serius dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan.

Tidak hanya itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi program PKK juga berperan besar dalam minimnya partisipasi. Masih banyak warga yang belum mengetahui secara menyeluruh apa itu PKK dan bagaimana program ini dapat memberikan manfaat langsung dalam kehidupan mereka, terutama dalam aspek peningkatan pendidikan dan keterampilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pengurus PKK serta pemerintah desa belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan optimal. Edukasi yang tidak disampaikan secara menyeluruh dan berulang membuat banyak warga tidak merasa terlibat atau tidak melihat urgensi dalam mengikuti program. Akibatnya, keberlangsungan program menjadi stagnan karena tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat sasaran.

Faktor penghambat implementasi Program PKK dalam meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan di Desa Naga Timbul mencakup masalah internal dari sisi pengurus yang belum maksimal dalam menyosialisasikan program dan dalam meningkatkan kapasitas kader, serta masalah eksternal dari masyarakat seperti rendahnya kesadaran, kurangnya keseriusan dalam mengikuti pelatihan, hambatan transportasi, dan minimnya pemahaman terhadap tujuan program. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi program di masa mendatang, perlu dilakukan penguatan kapasitas kader PKK, peningkatan frekuensi dan kualitas sosialisasi program, serta perbaikan dalam penyediaan fasilitas pendukung, termasuk transportasi. Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan komunikatif agar mereka merasa menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan yang dijalankan. Dengan demikian,

keberhasilan program PKK tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa telah menunjukkan upaya yang cukup dalam meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan desa. Hal ini tercermin dari pelaksanaan berbagai kegiatan pelatihan, koordinasi program oleh kader PKK, serta dukungan sumber daya yang memadai. Dalam beberapa aspek seperti komunikasi dan disposisi pelaksana, program ini telah berjalan dengan cukup baik, di mana informasi kebijakan telah sampai kepada masyarakat, dan kader PKK menunjukkan komitmen terhadap pemberdayaan perempuan. Namun demikian, aspek struktur birokrasi masih menjadi tantangan utama karena ketiadaan prosedur baku dan sistem manajemen program yang terstruktur. Ketidakteraturan dalam koordinasi dan pelaporan menjadi penghambat dalam efektivitas pelaksanaan program secara menyeluruh.

Selain itu, faktor penghambat lainnya datang dari sisi internal dan eksternal. Dari internal, lemahnya sosialisasi serta keterbatasan kapasitas kader menjadi hambatan dalam menjangkau partisipasi perempuan secara merata. Di sisi eksternal, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya motivasi ibu-ibu dalam mengikuti pelatihan, keterbatasan transportasi, dan minimnya pemahaman terhadap manfaat program menjadi penyebab utama kurang maksimalnya hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang mencakup pelatihan lanjutan bagi kader, peningkatan intensitas sosialisasi, penyediaan fasilitas pendukung, serta pendekatan yang lebih komunikatif dan partisipatif kepada masyarakat. Dengan sinergi yang lebih kuat antara pengurus PKK, pemerintah desa, dan masyarakat, program ini memiliki potensi besar dalam memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

REFERENSI

- Al'amin, A. (2017). Penerapan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Tentang Modal Sosial Pada Pelaksanaan Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan Program PKK Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru). *Jom Fisip*, 4(2), 1–15.
- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Rineka Cipta.
- Barus, V. C. B., Bara, B. M. B., & Angelia, N. (2020). Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalim baru) Women's Participation in Village Institutions (Study at Village Office of Perpenden Kecamatan Kutalimbaru). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi*, 2(2), 128–136. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom>
- Harahap, J., & Rizal, F. (2019). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Wanita Di Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. In *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* (Vol. 7, Issue 2). <https://doi.org/10.37064/jpm.v7i2.5827>
- Herlina, H. (2019). Fungsi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (pkk) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di desa maasawah kecamatan cimerak kabupaten pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 201–212.
- Indah, W. (2019). *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Di Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Indrawati, A., Aziz, R., Lubis, M. M., & Usman, M. (2022). PKM Pelatihan Dan Penerapan Budidaya Tanaman Secara Hidroponik Pada Kelompok PKK (KWT) Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Pelita Masyarakat*, 4(1), 10–22. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v4i1.6886>

- Kurniaty, E. Y., Muda, I., Batubara, B. M., Jamil, B., & Suharyanto, A. (2021). Sosialisasi Program Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Kepada Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Untuk Menunjang Program Pemerintah Daerah. *Pelita Masyarakat*, 3(1), 6–16.
- Lubis, J. S. (2021). *Peran Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan Di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mirna, M., & Mardhiah, N. (2022). Pelaksanaan PKK di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir (Studi Kasus Pokja: Pendidikan dan Keterampilan). *Journal of Social and Policy Issues*, 58–64.
- Mirnawati. (2018). Peran Pkk (Pemberdayaan Dan Kesejahteraankeluarga) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Masyarakat Desa Aska Kecamatan Sinjai. In (*Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar*) (pp. 1–84).
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Munthe, H. M., & Hafi, B. (2018). Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat Untuk Mendukung Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(2), 60–65. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.14>
- Purba, E. P., & others. (2024). IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH UNTUK KEMANDIRIAN PEREMPUAN DI DESA CINTA RAKYAT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(04), 331–345.
- Rahmi, A., Ismail, I., & Sore, U. B. (2023). Kontribusi Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Cambayya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Paradigma Journal of Administration*, 1(1), 24–28.
- Rusdi Nurazmi Izmi. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. *Skripsi Fisip. Universitas Medan Area*.
- Santifa, M., & Harahap, D. (2020). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Mawar Sejadi di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 89–98.
- Sembiring, W. M., Kurniaty, E. Y., Lubis, Y. A., Jamil, B., & Suharyanto, A. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. *Pelita Masyarakat*, 2(2), 111–117. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v2i2.4875>
- Simangunsong, F. (2015). Kajian Penggalan Potensi dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(1), 37–49.
- Siregar, N. S. S., Vita, N. I., & Sari, W. P. (2022). Peningkatan Keterampilan Public Speaking dan Etika Komunikasi Bagi Pengurus dan Anggota Tim Penggerak PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) se Kota Medan. *Pelita Masyarakat*, 4(1), 23–32. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v4i1.6953>
- Sunaryo, A. (2020). Implementasi pemberdayaan perempuan melalui 10 program pokok PKK. *Public Service and Governance Journal*, 1(2), 74–99.
- Waziana, W., Saputra, R. H., Sari, N. Y., Kasmi, K., & Aulia, D. (2022). Pemanfaatan E-Commerce Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Ibu-Ibu PKK Pelaku Bisnis. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 107–112.